



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 15 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Blora yang berbasis kinerja untuk meningkatkan kinerja, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;

- e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi; dan
 - f. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati—sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
 - (4) Daftar Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 14 Jului 2020

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.

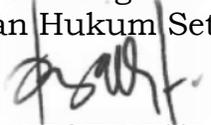
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 45

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BLORA NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN BLORA

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

| NO | JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN |
|---|---|---------------------------------------|
| I | PAJAK DAERAH | |
| | 1. Pajak Hotel | BPPKAD Kab. Blora |
| | 2. Pajak Restoran | BPPKAD Kab. Blora |
| | 3. Pajak Hiburan | BPPKAD Kab. Blora |
| | 4. Pajak Reklame | BPPKAD Kab. Blora |
| | 5. Pajak Penerangan Jalan Umum | BPPKAD Kab. Blora |
| | 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | BPPKAD Kab. Blora |
| | 7. Pajak Parkir | BPPKAD Kab. Blora |
| | 8. Pajak Air Tanah | BPPKAD Kab. Blora |
| | 9. Pajak Sarang Burung Walet | BPPKAD Kab. Blora |
| | 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | BPPKAD Kab. Blora |
| 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | BPPKAD Kab. Blora | |
| II | RETRIBUSI DAERAH | |
| | 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan Kab. Blora |

| NO | JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN |
|----|--|---|
| | 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora |
| | | Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora |
| | 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora |
| | 4. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora |
| | 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora |
| | | Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora |
| | 6. Retribusi Terminal | Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora |
| | 7. Retribusi Tempat Khusus Parkir | Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora |
| | | Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora |
| | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora |
| | 8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora |
| | 9. Retribusi Izin Trayek | Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora |
| | 10. Retribusi Pelayanan Pasar | Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora |
| | 11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora |
| | | Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora |

| NO | JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN |
|----|--|--|
| | 12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | DPUPR Kab. Blora Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora Dinas Kesehatan Kab. Blora Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora Bagian Umum Setda Kab. Blora Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Blora |
| | 13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora |
| | 14. Retribusi Rumah Potong Hewan | Dinas Peternakan Dan Perikanan Kab. Blora |
| | 15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | DPMPTSP Kab. Blora |
| | 16. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | DPMPTSP Kab. Blora |
| | 17. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora |
| | 18. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Blora |

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 15
 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI
 KABUPATEN BLORA

RINCIAN DAN PROSENTASE PEMBAGIAN INSENTIF UNTUK SETIAP JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

| NO | JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI | BUPATI | WAKIL BUPATI | PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN | PIHAK LAIN | PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN | | |
|----|---|--------|-----------------|--|---------------|--|--------------------------|-------|
| | | | | | | PEMUNGUT | LURAH/ KEPALA DESA | CAMAT |
| I | PAJAK DAERAH | | | | | | | |
| | 1. Pajak Hotel | 7,00% | 5,00% | 88,00% | | | | |
| | 2. Pajak Restoran | 7,00% | 5,00% | 88,00% | | | | |
| | 3. Pajak Hiburan | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 4. Pajak Reklame | 7,00% | 5,00% | 88,00% | | | | |
| | 5. Pajak Penerangan Jalan Umum | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 7. Pajak Parkir | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 8. Pajak Air Tanah | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |

| NO | JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI | BUPATI | WAKIL BUPATI | PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN | PIHAK LAIN | PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN | | |
|----|--|--------|-----------------|--|---------------|--|--------------------------|-------|
| | | | | | | PEMUNGUT | LURAH/ KEPALA DESA | CAMAT |
| | 9. Pajak Sarang Burung Walet | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 8,00% | 4,00% | 73,00% | | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| II | RETRIBUSI DAERAH | | | | | | | |
| | 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 4. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 6. Retribusi Terminal | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 7. Retribusi Tempat Khusus Parkir | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 9. Retribusi Izin Trayek | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 10. Retribusi Pelayanan Pasar | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| | 11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |

| NO | JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI | BUPATI | WAKIL BUPATI | PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN | PIHAK LAIN | PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN | | |
|-----|--|--------|-----------------|--|---------------|--|--------------------------|-------|
| | | | | | | PEMUNGUT | LURAH/ KEPALA DESA | CAMAT |
| 12. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| 13. | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| 14. | Retribusi Rumah Potong Hewan | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| 15. | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| 16. | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| 17. | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |
| 18. | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 9,00% | 7,00% | 84,00% | | | | |

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO